

SKRIPSI

**TRANSPARANSI ANGGARAN PADA PENERAPAN SISTEM
INFORMASI BERBASIS WEB DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG**



Disusun Oleh:
VINCE MAGDALENA SALAMENA
RPL22462201002

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG
TAHUN 2026**

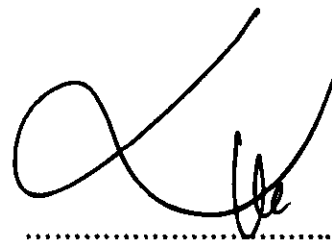
HALAMAN PERSETUJUAN
TRANSPARANSI ANGGARAN PADA PENERAPAN SISTEM
INFORMASI BERBASIS WEB DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

NAMA : VINCE MAGDALENA SALAMENA
NIM : RPL22462201002

Telah Disetujui Tim Pembimbing
Pada

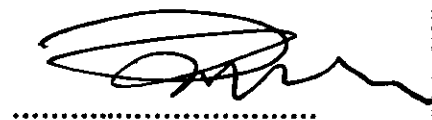
Pembimbing I

Munzir, S.E., M.Ak.
NIDN : 1410099501


.....

Pembimbing II

Musriani, M.M.
NIDN : 1401129801


.....

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN SISTEM INFORMASI TRANSPARANSI KEUANGAN PEMILU BERBASIS WEB PADA KPU KABUPATEN SORONG

Nama : Vince Magdalena Salamena
NIM : RPL22462201002

Skripsi ini telah diuji oleh Dewan Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Pada, 25 Juli 2026

Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora



Edad Ardiansyah, S.Psi., M.Si.
NIDN: 1419099401

Tim Penguji Skripsi:

1. Musriani, M.M.
NIDN: 1401129801
2. Yusron Difinubun, S.E., M.Acc.
NIDN: 1407079001
3. Munzir, S.E., M.Ak.
NIDN: 1410099501

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, proposal penelitian ini dapat disusun dengan judul **"TRANSPARANSI ANGGARAN PADA PENERAPAN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG "**.

Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Humaniora, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, khususnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan selama penyusunan proposal ini.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar dapat menjadi lebih baik kedepannya.

Akhir kata, penulis mengucapkan Terima kasih.

Sorong, 02 Juni 2026



Vince Magdalena Salamena

ABSTRAK

Vince Magdalena Salamina RPL22462201002. **TRANSPARANSI ANGGARAN PADA PENERAPAN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG**

Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Juni 2026

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menerapkan sistem informasi transparansi anggaran berbasis web pada KPU Kabupaten Sorong sehingga informasi anggaran dapat diakses secara cepat, mudah, dan transparan. Metode yang digunakan adalah Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif partisipan dalam konteks alamiah (Arioen et al., 2023). Menurut (Rachman et al., 2024), penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial atau kemanusiaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi yang dibangun mampu menyajikan informasi anggaran, laporan realisasi anggaran, serta dokumen pendukung secara daring sehingga meningkatkan transparansi, efisiensi pengelolaan informasi, dan kemudahan akses bagi masyarakat maupun pihak internal.

Kata Kunci : *Transparansi Anggaran Pada Penerapan Sistem Informasi Berbasis Web*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Kajian Teori.....	13
2.1.1. Teori Transparansi.....	13
2.1.2. Teori Akuntabilitas Publik.....	14
2.1.3. Sistem Informasi Transparansi Keuangan Berbasis Web	17
2.2 Penelitian Terdahulu	19
2.3 Kerangka Konseptual Penelitian.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1. Jenis Penelitian	25
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
3.3. Desain Penelitian	26
3.4. Subjek Penelitian	27
3.5. Teknik Pengumpulan Data	27
3.6. Instrumen Penelitian	28
3.7. Teknis Analisis Data	29
3.8. Uji Keabsahan Data.....	33
3.9. Definisi Operasional Penelitian	36
BAB IV	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	38
4.1.1. Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong	38
4.1.2. Visi dan Misi KPU Kabupaten Sorong	39
4.1.3. Tugas dan Fungsi KPU Kabupaten Sorong	39
4.2 Hasil Penelitian.....	40
4.2.1. Bentuk Sistem Keuangan KPU Kabupaten Sorong	40

4.2.2. Peranan Sistem Dalam Mendukung Transparansi Keuangan Pada KPU Kabupaten Sorong.....	43
4.2.3. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web Pada KPU Kabupaten Sorong.....	47
4.3 Pembahasan.....	52
4.3.1. Bentuk Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web Pada KPU Kabupaten Sorong.....	52
4.3.2. Sistem Informasi Keuangan Mendukung Transparansi Dan Akuntabilitas Pada KPU Kabupaten Sorong	57
4.3.3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong	60
BAB V.....	65
5.1. Kesimpulan.....	65
5.2. Saran.....	67
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3.7 Matriks Informan.....	25
Tabel 3.8 Definisi Operasional Penelitian.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian.....	18
Gambar 3.3 Desain Penelitian.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada era digital telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola organisasi sektor publik, termasuk lembaga penyelenggara pemilu. Transformasi digital tidak hanya digunakan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, pengelolaan anggaran yang melibatkan dana publik dalam jumlah besar memerlukan sistem yang mampu memberikan akses informasi secara cepat, akurat, dan terbuka kepada masyarakat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip *good governance*.

Transparansi keuangan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai tingkat akuntabilitas lembaga publik (Supawanhar et al., 2022). Oleh karena itu, penerapan sistem informasi berbasis web menjadi solusi yang relevan untuk mendukung keterbukaan informasi keuangan pemilu. Sistem digital memungkinkan masyarakat mengakses laporan keuangan secara real time sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi yang mengedepankan keterbukaan informasi publik dan pelayanan berbasis elektronik. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi transparansi keuangan merupakan kebutuhan strategis bagi lembaga

penyelenggara pemilu di Indonesia (Stephanie Hidayat et al., 2024).

Pemilu merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang membutuhkan dukungan sumber daya keuangan yang besar dalam setiap tahapan pelaksanaannya (Rajab et al., 2023). Pengelolaan dana pemilu yang tidak transparan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan seperti penyalahgunaan anggaran, inefisiensi penggunaan dana, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan menjadi faktor penting dalam menjaga integritas demokrasi dan kualitas tata kelola pemilu. Pengelolaan anggaran yang terbuka memungkinkan masyarakat, pengawas pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan dana publik (Pristianto et al., 2024). Di Indonesia, kebutuhan terhadap transparansi keuangan semakin meningkat seiring besarnya anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Oleh sebab itu, sistem informasi transparansi keuangan berbasis web dapat menjadi media yang efektif dalam menyampaikan informasi penggunaan anggaran kepada publik. Melalui sistem tersebut, laporan keuangan dapat diakses secara mudah, cepat, dan akurat sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban moral lembaga publik kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan (Melyn Anggraini & Ersi Sisdiyanto, 2024).

Keterbukaan informasi publik telah menjadi salah satu tuntutan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa setiap

badan publik wajib menyediakan informasi yang dapat diakses masyarakat secara transparan dan mudah diperoleh. Dalam pelaksanaan pemilu, prinsip keterbukaan informasi mencakup berbagai aspek, termasuk informasi mengenai penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran. Namun, pada praktiknya masih terdapat berbagai kendala dalam penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat, seperti keterlambatan publikasi laporan, keterbatasan akses dokumen, serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat sulit memperoleh informasi yang komprehensif mengenai penggunaan anggaran pemilu. Pemanfaatan sistem informasi berbasis web dapat menjadi sarana untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menyediakan platform digital yang mampu menampilkan informasi keuangan secara terbuka dan berkelanjutan (Herlin et al., 2020). Kehadiran sistem tersebut juga dapat mendukung implementasi prinsip transparansi yang menjadi salah satu fondasi utama good governance. Dengan demikian, penerapan sistem informasi transparansi keuangan berbasis web menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik pada lembaga penyelenggara pemilu (Muaro et al., 2023).

Seiring berkembangnya konsep e-government, berbagai instansi pemerintah mulai mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam proses administrasi dan pengelolaan keuangan. E-government tidak hanya berfungsi sebagai sarana digitalisasi layanan publik, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas organisasi sektor publik. Dalam lingkungan KPU, berbagai inovasi digital telah diterapkan, seperti Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP), dan berbagai aplikasi pendukung penyelenggaraan pemilu lainnya.

Keberhasilan implementasi sistem-sistem tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemilu secara keseluruhan. Namun demikian, aspek transparansi keuangan masih memerlukan penguatan melalui sistem yang secara khusus dirancang untuk mengelola dan menyajikan informasi keuangan kepada publik. Penerapan sistem informasi transparansi keuangan berbasis web diharapkan mampu memperluas cakupan digitalisasi KPU sehingga tidak hanya berfokus pada aspek teknis pemilu, tetapi juga pada pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya sistem tersebut, proses monitoring dan evaluasi penggunaan dana pemilu dapat dilakukan secara lebih efektif oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Dalam perspektif akuntansi sektor publik, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip fundamental yang saling berkaitan dalam pengelolaan keuangan organisasi pemerintah (Supardi et al., 2023). Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat mengetahui bagaimana anggaran direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Sementara itu, akuntabilitas menekankan pada kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan sumber daya publik kepada pihak yang memberikan mandat.

KPU sebagai lembaga yang mengelola dana negara dalam pelaksanaan pemilu dituntut untuk menerapkan kedua prinsip tersebut secara optimal. Ketersediaan sistem informasi keuangan berbasis web dapat membantu penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat, terdokumentasi dengan baik, serta mudah diakses oleh masyarakat. Selain meningkatkan kualitas informasi keuangan, sistem tersebut juga dapat memperkuat pengendalian internal dan

mengurangi risiko kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan anggaran. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi transparansi keuangan berbasis web menjadi bagian penting dalam mendukung praktik akuntansi sektor publik yang modern dan berorientasi pada akuntabilitas publik (Andriyan et al., 2024).

KPU Kabupaten Sorong sebagai salah satu penyelenggara pemilu di tingkat daerah memiliki peran penting dalam mengelola anggaran pemilu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dana hibah pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Besarnya anggaran yang dikelola menuntut adanya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, karakteristik geografis Kabupaten Sorong yang memiliki wilayah cukup luas menuntut pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat distribusi dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Kehadiran sistem informasi transparansi keuangan berbasis web dapat menjadi sarana efektif dalam menyediakan akses informasi keuangan tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Melalui platform digital, masyarakat dapat memperoleh informasi terkait penggunaan anggaran pemilu secara lebih mudah dibandingkan melalui metode konvensional. Dengan demikian, sistem informasi berbasis web berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap KPU Kabupaten Sorong sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang profesional dan akuntabel.

Meskipun teknologi informasi menawarkan berbagai manfaat, implementasinya dalam pengelolaan keuangan publik masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta kesiapan organisasi menjadi faktor

yang memengaruhi efektivitas penerapan sistem informasi keuangan. Permasalahan seperti keterbatasan kompetensi pengguna, kesalahan input data, dan integrasi sistem yang belum optimal sering kali menjadi hambatan dalam menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas. Dalam konteks KPU, kendala tersebut dapat berdampak pada keterlambatan pelaporan dan menurunnya akurasi informasi yang disampaikan kepada publik. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi transparansi keuangan berbasis web tidak hanya memerlukan dukungan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan komitmen organisasi dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi. Evaluasi terhadap penerapan sistem informasi menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana sistem tersebut mampu memenuhi kebutuhan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemilu. Penelitian mengenai implementasi sistem informasi transparansi keuangan di KPU Kabupaten Sorong diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola keuangan pemilu.

Tren digitalisasi transparansi keuangan politik dan pemilu terus berkembang sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas demokrasi. Berbagai lembaga internasional menekankan pentingnya publikasi data keuangan secara digital karena mampu meningkatkan aksesibilitas informasi, mempercepat pengawasan publik, dan mengurangi peluang terjadinya korupsi politik (Mihadi Putra et al., 2024). Transparansi keuangan berbasis digital memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara real time serta memudahkan lembaga pengawas dalam melakukan monitoring terhadap penggunaan dana publik (Achmad et al., 2025). Selain itu, perkembangan

teknologi informasi juga mendorong lahirnya konsep open government dan open data yang menempatkan keterbukaan informasi sebagai instrumen utama dalam membangun kepercayaan publik. Dalam konteks tersebut, penerapan sistem informasi transparansi keuangan berbasis web pada KPU Kabupaten Sorong menjadi relevan dengan praktik internasional yang mendorong digitalisasi tata kelola keuangan pemilu. Langkah ini tidak hanya mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, tetapi juga memperkuat posisi KPU sebagai lembaga yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan demokrasi modern (Pramudyawardhani & Munari, 2023).

Penelitian mengenai sistem informasi transparansi keuangan pemilu masih relatif terbatas dibandingkan penelitian tentang sistem informasi pemilihan atau rekapitulasi suara elektronik. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek akuntabilitas pengelolaan anggaran, transparansi laporan dana kampanye, atau efektivitas sistem informasi administrasi pemilu. Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas penerapan sistem informasi transparansi keuangan pemilu berbasis web pada tingkat KPU kabupaten masih belum banyak dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam perspektif akuntansi sektor publik dan sistem informasi akuntansi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur mengenai transparansi keuangan publik berbasis teknologi informasi. Selain itu, hasil penelitian juga dapat menjadi referensi bagi lembaga penyelenggara pemilu dalam merancang sistem informasi yang mampu meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu berfokus pada transparansi dan

akuntabilitas keuangan sektor publik secara umum, implementasi e-government, sistem informasi keuangan daerah, serta pengelolaan dana kampanye dan dana hibah pemilu (Dahlia et al., 2025; Marcella et al., 2022; Mazzoli & Baiocco, 2025). Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat kabupaten, khususnya di KPU Kabupaten Sorong, masih sangat terbatas. Penelitian sebelumnya umumnya hanya menilai aspek akuntabilitas laporan keuangan atau efektivitas penggunaan sistem informasi internal tanpa mengintegrasikan dimensi keterbukaan informasi publik yang dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui platform berbasis web. Oleh karena itu, terdapat research gap berupa minimnya kajian mengenai pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana transparansi keuangan pemilu yang menghubungkan pengelolaan keuangan, akuntabilitas publik, dan aksesibilitas informasi secara digital.

Adapun kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis penerapan sistem informasi transparansi keuangan pemilu berbasis web sebagai instrumen akuntabilitas publik pada lembaga penyelenggara pemilu di tingkat daerah, dengan fokus pada KPU Kabupaten Sorong. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi fungsi sistem dari perspektif teknis, tetapi juga menilai kontribusinya terhadap transparansi, kepercayaan publik, dan tata kelola keuangan pemilu yang sesuai dengan prinsip good governance dalam konteks penyelenggaraan demokrasi digital di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa transparansi keuangan merupakan aspek penting dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Perkembangan teknologi

informasi memberikan peluang besar bagi KPU untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi melalui penerapan sistem informasi transparansi keuangan berbasis web. KPU Kabupaten Sorong sebagai penyelenggara pemilu di tingkat daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital guna mendukung keterbukaan informasi dan tata kelola keuangan yang lebih baik.

Selain menjawab tuntutan regulasi mengenai keterbukaan informasi publik, sistem tersebut juga dapat menjadi sarana penguatan pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran pemilu. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong” menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis bagaimana implementasi sistem tersebut dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan pemilu.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian latar belakang permasalahan, maka rumusan permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana bentuk Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong?
2. Apakah bentuk sistem tersebut mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemilu di KPU Kabupaten Sorong?
3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target yang ingin dicapai dalam penelitian.

Tujuan penelitian biasanya berusaha menjawab permasalahan yang diteliti.

1. Untuk menganalisis bentuk Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong.
2. Untuk mengetahui peran Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemilu di KPU Kabupaten Sorong.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat dalam penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Akuntansi Sektor Publik dan Sistem Informasi Akuntansi yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada lembaga publik. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai penerapan sistem informasi berbasis web dalam mendukung keterbukaan informasi keuangan pemilu serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa terkait digitalisasi tata kelola keuangan publik dan implementasi e-government.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi KPU Kabupaten Sorong. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi KPU Kabupaten Sorong dalam meningkatkan kualitas penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web.

- b. Bagi Masyarakat. Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya transparansi pengelolaan keuangan pemilu serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap akses informasi publik yang disediakan oleh KPU.
- c. Bagi Pemerintah dan Lembaga Publik. Penelitian dapat menjadi referensi bagi pemerintah maupun lembaga publik lainnya dalam mengembangkan sistem informasi transparansi keuangan berbasis web sebagai sarana meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik. Temuan penelitian dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait digitalisasi tata kelola keuangan sektor publik.
- d. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi ilmiah dan bahan kajian bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti yang tertarik pada bidang Akuntansi Sektor Publik, Sistem Informasi Akuntansi, e-Government, dan transparansi keuangan publik. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lanjutan dengan objek, metode, maupun variabel yang berbeda.
- e. Bagi Penulis. Penelitian ini menjadi sarana untuk menerapkan dan mengembangkan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya terkait Akuntansi Sektor Publik dan Sistem Informasi Akuntansi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Teori Transparansi

Dalam perspektif akuntansi sektor publik, transparansi memiliki hubungan yang erat dengan pengelolaan keuangan negara karena setiap penggunaan anggaran publik harus dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Transparansi keuangan diwujudkan melalui penyajian laporan keuangan yang terbuka, lengkap, dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Menurut (Prihatminingtyas et al., 2021), transparansi keuangan merupakan keterbukaan organisasi publik dalam menyampaikan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran kepada masyarakat. Informasi keuangan yang transparan memungkinkan masyarakat untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta mendorong terciptanya pengawasan publik yang lebih baik. Selain itu, transparansi juga berperan dalam mengurangi risiko korupsi, kolusi, dan nepotisme karena setiap aktivitas pengelolaan keuangan dapat dipantau oleh publik. Dalam penyelenggaraan pemilu, transparansi keuangan menjadi sangat penting mengingat dana yang digunakan berasal dari anggaran negara sehingga penggunaannya harus sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik (Hardianti Marsawal et al., 2021). Oleh karena itu, penerapan sistem informasi berbasis teknologi menjadi salah satu strategi yang efektif untuk

meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemilu.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi praktik transparansi dari sistem konvensional menuju sistem digital yang lebih terbuka dan mudah diakses. Pemanfaatan sistem informasi berbasis web memungkinkan lembaga publik menyajikan informasi keuangan secara real time sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Menurut United Nations (2022), digitalisasi informasi publik melalui platform elektronik dapat meningkatkan transparansi, efisiensi pelayanan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, sistem informasi transparansi keuangan berbasis web dapat digunakan sebagai sarana publikasi laporan keuangan, realisasi anggaran, dan informasi penggunaan dana pemilu secara terbuka kepada masyarakat. Keberadaan sistem tersebut tidak hanya meningkatkan aksesibilitas informasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Berdasarkan uraian tersebut, transparansi dapat dipahami sebagai keterbukaan informasi yang disampaikan secara jujur, lengkap, tepat waktu, dan mudah diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga publik dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan sumber daya negara (Ekawaty & Kayko, 2023).

2.1.2. Teori Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menekankan kewajiban setiap organisasi sektor publik untuk mempertanggungjawabkan

seluruh aktivitas, kebijakan, serta penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya kepada masyarakat sebagai pemberi mandat (Alfiah et al., 2023). Akuntabilitas lahir dari hubungan antara pihak yang memberikan amanah (principal) dengan pihak yang menerima amanah (agent), dimana pihak penerima amanah memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukan selama menjalankan tugasnya. Dalam organisasi sektor publik, akuntabilitas menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran negara dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2021), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dengan adanya akuntabilitas, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana lembaga publik menjalankan tugas dan fungsinya sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Dalam perspektif akuntansi sektor publik, akuntabilitas tidak hanya berfokus pada penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban terhadap pencapaian program, penggunaan anggaran, kualitas pelayanan publik, dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pemerintah (Rahma Sari Pane & Kamilah, 2023). Akuntabilitas merupakan kewajiban organisasi sektor publik untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas yang baik dapat diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang akurat, transparan, dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Rahmawati Trisnanda et al., 2022).

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, akuntabilitas menjadi sangat penting karena dana yang digunakan berasal dari APBN maupun APBD yang merupakan bagian dari dana publik. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu wajib mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran kepada pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja, publikasi informasi penggunaan anggaran, serta penyediaan akses informasi kepada masyarakat. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas suatu lembaga, maka semakin besar pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam praktik akuntabilitas sektor publik. Saat ini, pertanggungjawaban tidak hanya dilakukan melalui laporan tertulis, tetapi juga melalui berbagai sistem informasi digital yang memungkinkan informasi disampaikan secara cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat. Menurut *International Federation of Accountants* (2021), pemanfaatan teknologi digital dalam sektor publik dapat meningkatkan akuntabilitas karena memungkinkan proses pencatatan, pelaporan, pengawasan, dan evaluasi dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi. Dalam penelitian ini, penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada

KPU Kabupaten Sorong merupakan salah satu bentuk implementasi akuntabilitas publik berbasis teknologi informasi. Sistem tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran pemilu secara terbuka sehingga dapat meningkatkan pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan pemilu. Dengan demikian, akuntabilitas dalam penelitian ini dipahami sebagai kemampuan KPU Kabupaten Sorong dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan pemilu secara terbuka, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pemanfaatan sistem informasi berbasis web sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat.

2.1.3. Sistem Informasi Transparansi Keuangan Berbasis Web

Sistem informasi transparansi keuangan berbasis web merupakan suatu sistem informasi yang memanfaatkan teknologi internet untuk mengelola, menyimpan, memproses, dan menyajikan informasi keuangan kepada pengguna secara elektronik (Saputra & Ramadhani, 2021). Sistem ini dirancang untuk memudahkan organisasi dalam menyampaikan informasi keuangan secara cepat, akurat, transparan, dan dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart (2021), sistem informasi merupakan serangkaian komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian organisasi. Dalam sektor publik, sistem informasi berbasis web memiliki peran penting dalam mendukung prinsip transparansi karena memungkinkan masyarakat memperoleh akses

terhadap informasi keuangan secara terbuka tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Melalui jaringan internet, informasi yang sebelumnya hanya dapat diperoleh melalui prosedur administratif tertentu kini dapat diakses secara langsung oleh masyarakat sebagai bentuk implementasi keterbukaan informasi publik (Sokid & Isa Martinus, 2023).

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong organisasi sektor publik untuk mengubah pola penyampaian informasi dari sistem konvensional menjadi sistem digital berbasis web. Menurut United Nations (2022), pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik mampu meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi pemerintahan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan publik. Dalam konteks pengelolaan keuangan, sistem informasi berbasis web memungkinkan laporan keuangan, realisasi anggaran, dan berbagai informasi terkait penggunaan dana publik dipublikasikan secara real time sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan secara langsung (Iqbal & Fridayani, 2022).

Selain meningkatkan transparansi, sistem berbasis web juga dapat mengurangi biaya administrasi, mempercepat penyampaian informasi, serta meminimalkan risiko kesalahan dalam pengelolaan data keuangan. Oleh karena itu, banyak lembaga pemerintah mulai mengembangkan sistem informasi keuangan berbasis web sebagai bagian dari transformasi digital dan implementasi *electronic government (e-government)*.

Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web dipahami sebagai suatu platform digital yang digunakan oleh KPU Kabupaten Sorong untuk

menyampaikan informasi terkait pengelolaan keuangan pemilu kepada masyarakat secara terbuka. Sistem tersebut berfungsi sebagai media komunikasi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pemilu. Menurut Richardus Eko Indrajit (2021), sistem informasi publik yang berbasis web dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan karena memungkinkan informasi tersedia secara lebih cepat, mudah diakses, dan terdokumentasi dengan baik. Dengan adanya sistem informasi transparansi keuangan berbasis web, masyarakat dapat mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemilu sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, keberadaan sistem informasi transparansi keuangan berbasis web menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung terciptanya tata kelola keuangan pemilu yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ferdana Femiliona	2021	Usaha KPU Mempertahankan Prinsip Transparansi pada Proses Pencalonan melalui SILON	Kualitatif	SILON meningkatkan transparansi informasi pencalonan secara digital.
2	M. Yusuf Saputra & Arisman	2021	Analisis Sistem Informasi Akuntansi Keuangan dalam Meningkatkan	Kualitatif	Sistem informasi akuntansi meningkatkan kualitas

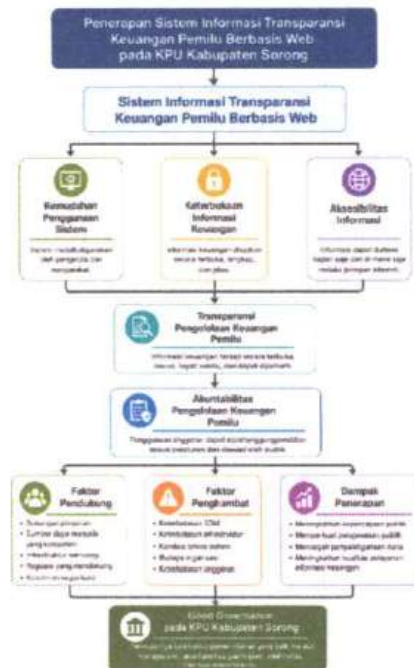
			Kualitas Laporan Keuangan KPU		laporan keuangan.
3	M.I. Santini	2022	Menakar Rekonsiliasi Laporan Keuangan Berbasis Web pada KPU Provinsi Bali	Kualitatif	Sistem berbasis web meningkatkan efektivitas rekonsiliasi laporan keuangan.
4	H.M. Shahib	2022	Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pemerintah di Indonesia	Deskriptif	Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan.
5	S.S. Zulaicha	2023	Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Web	Research and Development	Sistem berbasis web mempermudah proses pelaporan keuangan.
6	E. Kurniawati	2024	Analisis Sistem Informasi Keuangan pada KPU Sumatera Selatan	Kualitatif	Kualitas SDM memengaruhi efektivitas sistem informasi keuangan.
7	F.Y. Parindingan	2024	Evaluation of Transparency and Accountability of Regional Financial Management	Literature Review	Transparansi dan akuntabilitas mendukung good governance.
8	I. Jaya	2024	Pengaruh Penerapan E-Government, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kepercayaan Masyarakat	Kuantitatif	E-government meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik.
9	J.H. Simanjuntak	2025	Implementasi E-Government dalam Mewujudkan Transparansi Informasi Publik	Kualitatif	E-government meningkatkan keterbukaan informasi publik.

10	M.A. Hasyim	2025	Implementasi E-Government untuk Transparansi Laporan Keuangan	Studi Literatur	Sistem digital meningkatkan transparansi laporan keuangan.
11	I. Sulastri	2025	Pengaruh E-Government terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik	Kuantitatif	E-government meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
12	N.N. Padang	2025	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Kuantitatif	Transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
13	D.E.R. Purba dkk.	2025	Pengembangan Sistem Informasi Transparansi Anggaran dan Pendanaan Berbasis Web	Research and Development	Sistem mendukung keterbukaan pengelolaan anggaran.
14	Marcella Eka Wistiaulia	2025	Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Rekapitulasi Suara Pilkada	Kualitatif	Transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor utama integritas pemilu.
15	G.A.D. Puspasari	2025	Analisis Strategis E-Government dalam Pengelolaan Keuangan Publik	Kualitatif	Digitalisasi meningkatkan efisiensi dan transparansi keuangan publik.
16	Transparency International	2025	Digital Disclosure of Political Finance	Comparative Study	Transparansi digital meningkatkan keterbukaan pendanaan politik.
17	Transparency International	2025	Towards Standards for Integrity in Political Finance	Discussion Paper	Transparansi memperkuat integritas

					keuangan politik.
18	European Parliament Research Service	2025	The Financial Transparency System	Policy Analysis	Sistem transparansi meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana publik.
19	Commonwealth Parliamentary Association	2025	Financial Transparency in Parliaments and Elections	Policy Research	Transparansi meningkatkan legitimasi lembaga demokrasi.
20	Transparency International Indonesia	2025	Indonesian Political Finance Integrity Assessment	Policy Study	Masih terdapat kesenjangan transparansi dalam pelaporan dana politik.
21	Mahmood Khosrowjerdi	2022	Good Governance and National Information Transparency	Comparative Study	Transparansi informasi berhubungan dengan kualitas good governance.
22	Miri Zilka dkk.	2022	Transparency, Governance and Regulation of Algorithmic Tools	Case Study	Transparansi sistem digital meningkatkan kepercayaan publik.
23	Mehdi Barati	2023	Open Government Data Programs and Information Privacy Concerns	Literature Review	Open government data meningkatkan transparansi pemerintahan.
24	Febrian & Figueredo	2024	KemenkeuGPT: Leveraging Government Financial Data	Mixed Method	Teknologi digital meningkatkan keterbukaan data keuangan pemerintah.
25	International Journal of Scientific Research	2023	Transparency and Accountability of Financial	Kualitatif	Transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor

			Management of Political Parties		penting dalam pengelolaan keuangan politik.
--	--	--	---------------------------------	--	---

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian berfokus pada penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemilu. Sistem informasi berbasis web diharapkan mampu memberikan kemudahan akses, keterbukaan informasi, dan penyajian data keuangan yang lebih efektif kepada masyarakat. Transparansi yang tercipta melalui sistem tersebut selanjutnya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemilu karena setiap penggunaan anggaran dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Dalam implementasinya, terdapat faktor-faktor pendukung maupun faktor-faktor penghambat yang memengaruhi keberhasilan penerapan sistem. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem informasi tersebut, bagaimana kontribusinya terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan pemilu, serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya dalam mendukung terwujudnya prinsip good governance pada KPU Kabupaten Sorong.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif partisipan dalam konteks alamiah (Arioen et al., 2023). Menurut (Rachman et al., 2024), penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial atau kemanusiaan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai penerapan sistem informasi transparansi keuangan pemilu berbasis web pada KPU Kabupaten Sorong.

Pemilihan metode kualitatif dalam penelitian didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi sistem informasi transparansi keuangan, faktor pendukung dan penghambat penerapan sistem, serta kontribusinya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemilu. Dengan demikian, metode ini dinilai paling sesuai untuk mengkaji fenomena yang terjadi secara langsung di lingkungan KPU Kabupaten Sorong.

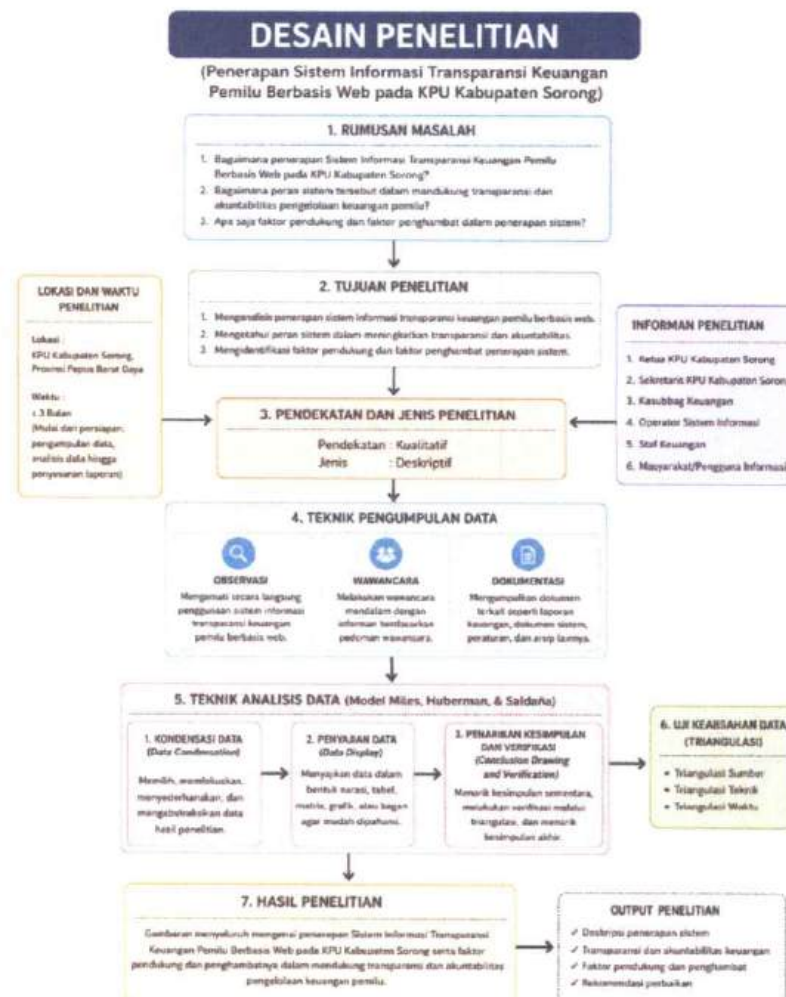
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada KPU Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan bahwa KPU Kabupaten Sorong merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan

pemilu serta memiliki sistem informasi yang mendukung keterbukaan informasi publik.

Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama tiga bulan yang mencakup kegiatan observasi, wawancara, dokumentasi, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Menurut (Rijal Fadli, 2021), penentuan lokasi penelitian harus disesuaikan dengan fokus penelitian agar data yang diperoleh dapat menggambarkan fenomena yang diteliti secara mendalam.

3.3. Desain Penelitian



Gambar 3.3 Desain Penelitian

3.4. Subjek Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap mengetahui dan memahami masalah yang diteliti.

Menurut (Sugiyono, 2001), purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sehingga data yang diperoleh dapat lebih representatif sesuai kebutuhan penelitian. Informan penelitian terdiri dari:

No	Informan	Keterangan
1	Ketua KPU Kabupaten Sorong	1 Orang
2	Sekretaris KPU Kabupaten Sorong	1 Orang
3	Kasubag Keuangan	1 Orang
4	Operator Sistem Informasi	1 Orang
5	Akademisi	2 Orang
6	Staf Keuangan	2 Orang
7	Masyarakat/Pengguna Informasi	2 Orang

3.5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung penggunaan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong. Menurut Lexy J. Moleong (2022), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh informasi yang akurat mengenai fenomena yang diteliti.
- b. Wawancara. Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview)

menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur. Menurut Creswell dan Creswell (2023), wawancara mendalam memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih luas mengenai pengalaman, pandangan, dan persepsi informan terhadap suatu fenomena.

- c. Dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan sistem informasi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Sorong. Menurut Sugiyono (2023), dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui catatan, arsip, laporan, foto, maupun dokumen lain yang mendukung penelitian.

3.6. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2022), Kualitas data yang dihasilkan dari penelitian dipengaruhi oleh dua faktor utama yang harus diperhatikan oleh peneliti, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Instrumen penelitian merupakan perangkat yang digunakan dalam pengumpulan data agar proses tersebut bisa berlangsung lebih efisien dan menghasilkan data yang lebih akurat, cermat, komprehensif, serta terstruktur, sehingga lebih gampang untuk diproses dan dianalisis.

Menurut Moleong (2022), dalam penelitian kualitatif instrumen utama adalah peneliti sendiri (human instrument). Peneliti berperan dalam menentukan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyimpulkan hasil penelitian.

Instrumen pendukung yang digunakan meliputi: a) Pedoman wawancara. b) Lembar observasi. c) Alat perekam suara, d) Kamera dokumentasi, e) Laptop dan alat tulis.

3.7. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña (2019). Model analisis interaktif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai proses pengolahan data penelitian kualitatif mulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak data mulai dikumpulkan sampai penelitian selesai sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong.

Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2019), analisis data kualitatif terdiri atas tiga alur kegiatan yang berlangsung secara interaktif dan berkesinambungan, yaitu kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification).

a. Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pengelompokan data berdasarkan fokus penelitian sehingga data yang tidak relevan dapat disisihkan dan data yang relevan dapat dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut. Dalam penelitian ini, kondensasi data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Transkripsi Data. Seluruh hasil wawancara yang diperoleh dari informan

ditranskripsikan ke dalam bentuk tulisan secara lengkap untuk memudahkan proses analisis.

- 2) Pengkodean Data (Coding). Peneliti memberikan kode terhadap data yang memiliki tema atau makna yang sama. Misalnya:

TK = Transparansi Keuangan

AK = Akuntabilitas Keuangan

SI = Sistem Informasi

FP = Faktor Pendukung

FH = Faktor Penghambat

- 3) Kategorisasi Data. Data yang telah diberi kode kemudian dikelompokkan berdasarkan tema penelitian, seperti penerapan sistem, manfaat sistem, transparansi informasi, dan hambatan implementasi.
- 4) Reduksi Data. Data yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian disisihkan, sedangkan data yang relevan dipilih untuk dianalisis lebih lanjut.

Melalui proses kondensasi data, peneliti dapat memusatkan perhatian pada informasi yang berkaitan dengan penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web di KPU Kabupaten Sorong.

b. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data dikondensasi, tahap berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti memahami keseluruhan informasi yang telah diperoleh sehingga dapat dilakukan analisis yang lebih mendalam.

Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2019), penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis sehingga memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Narasi Deskriptif. Data hasil wawancara dan observasi disajikan dalam bentuk uraian atau deskripsi yang menjelaskan kondisi nyata mengenai penerapan sistem informasi transparansi keuangan pemilu di KPU Kabupaten Sorong.
- 2) Matriks Data. Peneliti menyusun matriks untuk membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan sehingga memudahkan proses identifikasi kesamaan dan perbedaan informasi. Contoh matriks:

Tabel 3.7 Matriks Informan

Fokus Penelitian	Informan 1	Informan 2	Informan 3
Transparansi Keuangan	Baik	Baik	Cukup
Akses Informasi	Mudah	Mudah	Mudah
Kendala Sistem	Jaringan	SDM	Jaringan

- 3) Tabel dan Dokumen Pendukung. Data dokumentasi berupa laporan keuangan, tangkapan layar sistem, serta dokumen kebijakan disajikan dalam bentuk tabel dan lampiran untuk memperkuat hasil analisis. Penyajian data yang sistematis akan membantu peneliti memahami hubungan antar data serta mempermudah proses penarikan kesimpulan.
- c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan

verifikasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk menemukan makna, pola, hubungan, dan keterkaitan antar temuan penelitian.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara pada awal proses pengumpulan data dan dapat berubah apabila ditemukan bukti baru yang lebih kuat selama penelitian berlangsung. Oleh karena itu, setiap kesimpulan yang diperoleh harus diverifikasi secara terus-menerus agar memiliki tingkat validitas yang tinggi. Dalam penelitian ini, verifikasi dilakukan melalui:

- 1) Membandingkan hasil wawancara antar informan untuk memastikan konsistensi informasi.
- 2) Membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi yang dilakukan di lapangan.
- 3) Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen pendukung seperti laporan keuangan, laporan kegiatan, dan dokumen sistem informasi.
- 4) Melakukan triangulasi data untuk menguji kebenaran dan kredibilitas temuan penelitian.

Berdasarkan proses tersebut, peneliti kemudian menarik kesimpulan mengenai:

- 1) Penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong.
- 2) Peran sistem dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemilu.
- 3) Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi sistem.
- 4) Efektivitas sistem dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

3.8. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan aspek yang sangat penting karena data yang diperoleh bersumber dari pengalaman, persepsi, dan informasi yang disampaikan oleh informan. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar akurat, dapat dipercaya, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Menurut Lexy J. Moleong (2022), keabsahan data adalah upaya yang dilakukan peneliti untuk menjamin bahwa temuan penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Salah satu teknik yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menguji keabsahan data adalah teknik triangulasi.

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan berbagai sumber, metode, maupun waktu pengumpulan data sebagai alat pembanding terhadap data yang diperoleh. Menurut Moleong (2022), triangulasi bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas data melalui proses pengecekan silang (*cross check*) terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan menggunakan tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

- a. Triangulasi Sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat konsistensi data yang diberikan oleh masing-masing informan sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih objektif dan akurat. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan

membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari Ketua KPU Kabupaten Sorong, Sekretaris KPU Kabupaten Sorong, Kasubbag Keuangan, Operator Sistem Informasi, Staf Keuangan, serta masyarakat atau pengguna informasi keuangan. Informasi yang diberikan oleh masing-masing informan kemudian dianalisis untuk melihat kesesuaian maupun perbedaan pandangan mengenai penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web. Sebagai contoh, apabila Ketua KPU menyatakan bahwa sistem informasi telah mampu meningkatkan transparansi keuangan, maka informasi tersebut akan dibandingkan dengan hasil wawancara dari Kasubbag Keuangan, operator sistem, dan masyarakat sebagai pengguna informasi. Apabila informasi yang diberikan menunjukkan kesamaan, maka data tersebut dapat dianggap memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Menurut Sugiyono (2023), triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda sehingga dapat diperoleh tingkat kepercayaan data yang lebih baik.

- b. Triangulasi Teknik. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data terhadap sumber yang sama. Teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya bergantung pada satu metode pengumpulan data, tetapi didukung oleh metode lainnya. Dalam penelitian ini, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari wawancara dengan informan akan dibandingkan dengan hasil pengamatan langsung di lapangan serta dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan sistem

informasi yang digunakan. Sebagai contoh, apabila informan menyatakan bahwa laporan keuangan pemilu telah dipublikasikan secara berkala melalui sistem berbasis web, maka peneliti akan melakukan observasi terhadap sistem tersebut dan memeriksa dokumen atau arsip publikasi laporan keuangan yang tersedia. Apabila hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan informasi yang sama, maka data tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Melalui triangulasi teknik, peneliti dapat mengurangi kemungkinan terjadinya bias yang muncul apabila hanya menggunakan satu teknik pengumpulan data. Dengan demikian, hasil penelitian akan menjadi lebih kuat dan dapat dipercaya.

- c. Triangulasi Waktu. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data pada waktu yang berbeda untuk mengetahui konsistensi informasi yang diberikan oleh informan. Menurut Sugiyono (2023), data yang diperoleh pada waktu tertentu dapat berbeda dengan data yang diperoleh pada waktu lainnya karena dipengaruhi oleh kondisi, situasi, maupun persepsi informan saat memberikan informasi. Dalam penelitian ini, triangulasi waktu dilakukan dengan mengulang proses wawancara atau observasi pada waktu yang berbeda terhadap informan yang sama. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh tetap konsisten dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sebagai contoh, peneliti dapat melakukan wawancara awal dengan Kasubbag Keuangan mengenai mekanisme publikasi laporan keuangan melalui sistem berbasis web. Selanjutnya, pada kesempatan lain peneliti kembali melakukan konfirmasi terhadap informasi tersebut untuk memastikan kesesuaiannya. Apabila informasi yang diperoleh pada waktu yang berbeda menunjukkan

hasil yang relatif sama, maka data tersebut dianggap memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Selain itu, triangulasi waktu juga dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh pada tahap awal penelitian dengan data yang diperoleh pada tahap akhir penelitian. Langkah ini penting untuk mengetahui apakah terdapat perubahan dalam penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web selama periode penelitian berlangsung.

- d. Penerapan Uji Keabsahan Data dalam Penelitian. Dalam penelitian mengenai Penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong, uji keabsahan data dilakukan melalui proses pengecekan silang terhadap seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti membandingkan informasi dari berbagai informan, memverifikasi data menggunakan dokumen resmi KPU Kabupaten Sorong, serta melakukan pengamatan langsung terhadap sistem informasi yang digunakan. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang informasi pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi data. Melalui penerapan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, diharapkan data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas, validitas, dan reliabilitas yang tinggi sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya mengenai penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong.

3.9. Definisi Operasional Penelitian

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai konsep atau fokus penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam pengumpulan dan analisis

data sehingga setiap variabel atau fokus penelitian dapat dipahami dan diukur secara jelas. Dalam penelitian ini, definisi operasional digunakan untuk memberikan batasan mengenai penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong yang meliputi aspek transparansi keuangan, akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi sistem.

Tabel 3.8 Definisi Operasional Penelitian

Fokus Penelitian	Indikator	Referensi
Bentuk Sistem Informasi Transparansi Keuanan Pemilu Berbasis Web	Penggunaan sistem, integrasi data, kemudahan penggunaan	Romney & Steinbart (2021)
Transparansi Keuangan	Keterbukaan informasi, aksesibilitas data, ketepatan waktu informasi	Mardiasmo (2021)
Akuntabilitas Keuangan	Pertanggungjawaban anggaran, kepatuhan regulasi, kualitas laporan keuangan	Mahmudi (2022)
Faktor Pendukung	SDM, infrastruktur teknologi, dukungan manajemen	Indrajit (2021)
Faktor Penghambat	Kendala teknis, keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran	Indrajit (2021)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri di tingkat kabupaten. KPU Kabupaten Sorong memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten Sorong berpedoman pada prinsip independensi, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan integritas guna mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkeadilan.

KPU Kabupaten Sorong berkedudukan di Aimas sebagai ibu kota Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Sebagai penyelenggara pemilu di tingkat daerah, KPU Kabupaten Sorong bertanggung jawab dalam melaksanakan berbagai tahapan pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pendaftaran peserta pemilu, sosialisasi pendidikan pemilih, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilu sesuai kewenangannya. Selain itu, KPU Kabupaten Sorong juga berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Dalam melaksanakan tugas kelembagaan, KPU Kabupaten Sorong didukung oleh unsur komisioner dan sekretariat yang menjalankan fungsi administrasi, perencanaan, keuangan, teknis penyelenggaraan, hukum, serta pengelolaan data dan informasi kepilimuan. Struktur organisasi tersebut dibentuk untuk memastikan seluruh tahapan pemilu dapat berjalan secara efektif, efisien,

dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

4.1.2 Visi dan Misi KPU Kabupaten Sorong

Sebagai bagian dari KPU Republik Indonesia, KPU Kabupaten Sorong memiliki orientasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, profesional, transparan, dan berintegritas. Upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola organisasi, serta pengembangan sistem informasi kepemiluan yang mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat. Adapun misi yang dijalankan antara lain: a) Menyelenggarakan pemilu dan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. b) Meningkatkan kualitas data pemilih secara berkelanjutan. c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. d) Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel. e) Mengembangkan sistem informasi dan layanan publik berbasis teknologi informasi guna meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi kepemiluan.

4.1.3 Tugas dan Fungsi KPU Kabupaten Sorong

KPU Kabupaten Sorong memiliki tugas utama menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu dan pemilihan di wilayah Kabupaten Sorong. Dalam pelaksanaannya, KPU Kabupaten Sorong menjalankan beberapa fungsi, yaitu: 1) Perencanaan dan pelaksanaan tahapan pemilu. 2) Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan. 3) Sosialisasi dan pendidikan pemilih. 4) Pengelolaan informasi dan dokumentasi kepemiluan. 5) Pelaksanaan administrasi, keuangan, dan pengelolaan sumber daya manusia. 6) Pelayanan informasi publik dan peningkatan transparansi penyelenggaraan pemilu. 7) Penyusunan laporan serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pemilu kepada KPU Provinsi dan KPU Republik Indonesia.

Penelitian dilaksanakan pada KPU Kabupaten Sorong karena lembaga tersebut merupakan institusi publik yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan demokrasi di tingkat daerah. Dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan keterbukaan informasi, KPU Kabupaten Sorong telah memanfaatkan teknologi informasi melalui website resmi dan berbagai media digital sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Pemanfaatan sistem informasi tersebut menjadi penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Sorong merupakan objek yang relevan untuk mengkaji implementasi sistem informasi berbasis web dalam mendukung transparansi informasi publik dan tata kelola kelembagaan yang baik.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Bentuk Sistem Informasi Keuangan KPU Kabupaten Sorong

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan pada KPU Kabupaten Sorong, diperoleh hasil bahwa sistem informasi yang saat ini digunakan telah mendukung penyelenggaraan pemilu melalui berbagai aplikasi dan website resmi. Namun, belum terdapat sistem informasi khusus yang secara terintegrasi menyajikan informasi pengelolaan keuangan pemilu kepada masyarakat secara terbuka dan real-time. Website resmi KPU Kabupaten Sorong saat ini lebih banyak digunakan untuk publikasi berita, pengumuman, sosialisasi, dokumentasi kegiatan, serta informasi tahapan pemilu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web yang dibutuhkan oleh KPU Kabupaten Sorong adalah sebuah platform digital yang mampu mengintegrasikan data perencanaan anggaran, realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban, dan

dokumen pendukung keuangan dalam satu portal yang dapat diakses oleh publik secara mudah, cepat, dan transparan.

Menurut informan penelitian, keterbukaan informasi keuangan merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan wawancara dengan Informan I (Sekretariat KPU Kabupaten Sorong), diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Selama ini informasi keuangan memang tersedia dalam bentuk laporan administrasi dan laporan pertanggungjawaban, tetapi belum ada media khusus berbasis web yang menampilkan informasi tersebut secara langsung kepada masyarakat." (Marthen Kambuaya, SE.M.SI 15 Mei 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem yang berjalan saat ini masih berorientasi pada kebutuhan pelaporan internal dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan akses informasi publik secara digital. Hal serupa disampaikan oleh Informan II yang menyatakan:

"Kalau masyarakat membutuhkan data keuangan tertentu biasanya melalui mekanisme permohonan informasi. Jadi belum bisa langsung melihat rincian penggunaan anggaran melalui website." (Wawancara, 15 Mei 2026)

Temuan tersebut sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang mengharuskan badan publik menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat tanpa prosedur yang berbelit-belit. Keberadaan layanan informasi dan dokumentasi publik menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan transparansi pemerintahan. Berdasarkan bentuk alur sistem yang diusulkan dapat digambarkan sebagai berikut: Bagian Keuangan → Input Data

Alur tersebut menunjukkan bahwa data yang dimasukkan oleh bagian keuangan akan tersimpan dalam basis data dan secara otomatis ditampilkan pada website transparansi sehingga masyarakat dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk sistem informasi transparansi keuangan pemilu berbasis web yang diharapkan oleh KPU Kabupaten Sorong mengarah pada konsep e-government yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi. Pemanfaatan website sebagai media publikasi informasi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara cepat, akurat, dan efisien. Selain itu, sistem ini dapat memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. KPU Kabupaten Sorong sendiri telah menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel melalui penguatan sistem informasi, dokumentasi publik, dan implementasi prinsip good governance.

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara bahwa bentuk Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong berupa sistem berbasis website yang menyediakan informasi anggaran, realisasi keuangan, laporan pertanggungjawaban, dan dokumen pendukung secara terintegrasi. Sistem tersebut dirancang untuk mempermudah akses informasi publik, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemilu, serta mendukung penerapan prinsip akuntabilitas dan good governance dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Sorong.

4.2.2 Peranan Sistem dalam Mendukung Transparansi Keuangan pada KPU Kabupaten Sorong

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Sorong, diperoleh informasi bahwa transparansi pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu. Ketua KPU Kabupaten Sorong menyatakan:

"KPU sebagai lembaga publik memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat, termasuk informasi terkait penggunaan anggaran pemilu. Selama ini laporan keuangan sudah disusun dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan, namun akses masyarakat terhadap informasi tersebut masih terbatas karena belum tersedia dalam satu sistem yang terintegrasi dan mudah diakses secara online." Lebih lanjut beliau menjelaskan:

"Keberadaan sistem informasi transparansi keuangan berbasis web akan sangat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi terkait anggaran dan realisasi kegiatan pemilu secara cepat tanpa harus mengajukan permohonan informasi secara manual."

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pimpinan lembaga mendukung pengembangan sistem informasi yang mampu meningkatkan keterbukaan informasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik, diketahui bahwa proses pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Sorong telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Beliau menyampaikan:

"Seluruh transaksi keuangan dicatat dan dilaporkan melalui sistem administrasi keuangan yang berlaku di lingkungan KPU. Setiap kegiatan

memiliki dokumen pendukung dan laporan pertanggungjawaban yang harus disusun secara lengkap." Namun demikian, beliau mengakui bahwa informasi keuangan yang dapat diakses publik masih terbatas.

"Saat ini informasi keuangan lebih banyak digunakan untuk kebutuhan pelaporan internal dan audit. Jika ada masyarakat yang membutuhkan informasi tertentu, biasanya harus melalui prosedur permintaan informasi kepada PPID."

Menurut beliau, sistem informasi transparansi keuangan berbasis web akan memberikan kemudahan dalam penyajian data kepada masyarakat.

"Jika tersedia sistem berbasis web, data anggaran dan realisasi dapat langsung ditampilkan sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran secara lebih mudah dan transparan."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Keuangan I, diperoleh informasi bahwa pengelolaan data keuangan saat ini masih dilakukan melalui beberapa aplikasi administrasi dan dokumen elektronik yang terpisah. Beliau menyatakan:

"Data keuangan sebenarnya tersedia dan terdokumentasi dengan baik, namun penyimpanannya masih tersebar dalam beberapa file dan aplikasi sehingga membutuhkan waktu ketika harus menyiapkan informasi tertentu." Terkait pengembangan sistem informasi transparansi keuangan, beliau menjelaskan:

"Sistem berbasis web akan membantu proses penyajian data karena informasi yang telah diinput dapat langsung ditampilkan kepada masyarakat tanpa perlu membuat laporan secara berulang." Menurut beliau, fitur yang paling dibutuhkan adalah dashboard anggaran dan

realisasi keuangan.

"Masyarakat perlu mengetahui berapa anggaran yang tersedia dan berapa yang sudah digunakan sehingga proses pengawasan publik dapat berjalan lebih baik."

Hasil wawancara dengan Staf Keuangan II menunjukkan bahwa transparansi keuangan merupakan kebutuhan yang semakin penting di era digital. Beliau menyampaikan:

"Saat ini masyarakat menginginkan informasi yang cepat dan mudah diakses. Jika informasi keuangan dapat ditampilkan melalui website, maka proses penyampaian informasi akan lebih efektif dibandingkan metode konvensional." Beliau juga menambahkan bahwa sistem yang dikembangkan harus memperhatikan keamanan data.

"Tidak semua dokumen keuangan dapat dipublikasikan secara penuh. Oleh karena itu sistem harus memiliki pengaturan hak akses sehingga informasi yang ditampilkan tetap sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik." Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa aspek keamanan dan klasifikasi informasi menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan sistem.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Operator Sistem Informasi KPU Kabupaten Sorong, diketahui bahwa infrastruktur teknologi informasi yang tersedia saat ini cukup mendukung implementasi sistem berbasis web. Beliau menjelaskan:

"KPU telah menggunakan berbagai sistem informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemilu, sehingga secara teknis pengembangan sistem transparansi keuangan berbasis web sangat memungkinkan untuk

diterapkan."

Menurut beliau, sistem yang akan dikembangkan sebaiknya memiliki fitur yang mudah digunakan oleh admin maupun masyarakat.

"Tampilan dashboard harus sederhana dan informatif. Pengguna harus bisa melihat informasi anggaran, realisasi, grafik penggunaan anggaran, serta mengunduh laporan yang telah dipublikasikan."

"Integrasi database menjadi hal penting agar data yang ditampilkan selalu diperbarui secara otomatis dan mengurangi risiko kesalahan input data."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Sorong, Kepala Subbagian Keuangan, dua orang Staf Keuangan, dan Operator Sistem Informasi, diperoleh kesimpulan bahwa seluruh informan mendukung pengembangan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web. Sistem yang diharapkan memiliki kemampuan untuk menyajikan informasi anggaran, realisasi keuangan, laporan pertanggungjawaban, dan dokumen pendukung secara terbuka kepada masyarakat.

Selain meningkatkan aksesibilitas informasi, sistem tersebut juga diharapkan mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, efektivitas pelayanan informasi publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KPU Kabupaten Sorong sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan pada KPU Kabupaten Sorong, diperoleh temuan bahwa pengembangan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web dinilai mampu mendukung penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemilu. Sistem tersebut memungkinkan informasi mengenai

perencanaan anggaran, realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban, serta dokumen pendukung dapat diakses oleh masyarakat secara lebih mudah, cepat, dan terbuka.

Transparansi merupakan prinsip yang menekankan keterbukaan informasi kepada publik sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi proses pengelolaan sumber daya publik. Sementara itu, akuntabilitas merupakan kewajiban lembaga publik untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo (2018), transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

4.2.3 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan pada KPU Kabupaten Sorong, diperoleh temuan bahwa penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat implementasi sistem. Faktor-faktor tersebut berasal dari aspek sumber daya manusia, teknologi informasi, kebijakan organisasi, infrastruktur, serta partisipasi masyarakat.

Menurut George C. Edwards III, keberhasilan implementasi suatu program dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Teori tersebut relevan untuk menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi penerapan sistem informasi transparansi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Sorong.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan pimpinan menjadi faktor utama yang mendukung implementasi sistem informasi transparansi keuangan.

utama yang mendukung implementasi sistem informasi transparansi keuangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Sorong, diperoleh informasi sebagai berikut:

"Pada prinsipnya kami mendukung setiap inovasi yang dapat meningkatkan keterbukaan informasi publik dan pelayanan kepada masyarakat. Sistem informasi transparansi keuangan berbasis web dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu." (Frengki Duwit, S.HUT Ketua KPU Kabupaten Sorong, 15 Mei 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan adanya komitmen pimpinan dalam mendukung transformasi digital dan peningkatan transparansi pengelolaan keuangan pemilu.

Faktor pendukung berikutnya adalah tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai. Berdasarkan wawancara dengan Operator Sistem Informasi diperoleh keterangan:

"Saat ini KPU sudah memiliki jaringan internet, perangkat komputer, server, dan website resmi yang dapat menjadi dasar pengembangan sistem transparansi keuangan berbasis web." (Yosef H Tri Wahyudi Operator Sistem Informasi, 18 Mei 2026).

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Sorong telah memanfaatkan berbagai aplikasi berbasis teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu sehingga secara teknis implementasi sistem relatif memungkinkan untuk dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Keuangan dan Logistik, diketahui bahwa data keuangan yang dimiliki telah tersusun sesuai mekanisme administrasi keuangan pemerintah. Beliau menyatakan:

"Data anggaran, realisasi kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban sudah tersedia serta terdokumentasi dengan baik sehingga dapat menjadi sumber data utama dalam sistem yang akan dikembangkan." (Iwan Setiawan, S.IP Kasubag Keuangan dan Logistik, 16 Mei 2026)

Ketersediaan data yang terstruktur menjadi modal penting dalam proses integrasi data ke dalam sistem informasi berbasis web.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik juga menjadi faktor pendukung implementasi sistem. Berdasarkan wawancara dengan Staf Keuangan II diperoleh informasi:

"Masyarakat saat ini menginginkan informasi yang cepat dan mudah diakses. Karena itu sistem berbasis web menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut." (Thigor A Kumuay, S.AN Staf Keuangan II, 17 Mei 2026)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi transparansi keuangan sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Operator Sistem Informasi, diperoleh informasi bahwa jumlah personel yang memiliki kompetensi khusus di bidang pengembangan sistem informasi masih terbatas. Beliau menjelaskan:

"Pengelolaan sistem informasi membutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan teknis khusus. Saat ini jumlah personel yang memiliki kompetensi tersebut masih terbatas sehingga perlu peningkatan kapasitas SDM." (Yosef H Tri Wahyudi Operator Sistem Informasi, 18 Mei 2026)

Keterbatasan SDM tersebut berpotensi mempengaruhi proses

pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan sistem secara berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam implementasi sistem informasi. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Subbagian Keuangan dan Logistik diperoleh keterangan:

"Pengembangan sistem tentu membutuhkan biaya, baik untuk pengadaan perangkat, pengembangan aplikasi, maupun pemeliharaan sistem. Hal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia."

(Iwan Setiawan, S.IP Kasubag Keuangan dan Logistik, 16 Mei 2026)

Dengan demikian, keberlanjutan sistem sangat bergantung pada dukungan pendanaan yang memadai. Faktor penghambat lainnya adalah perlunya pengaturan terkait keamanan informasi yang akan dipublikasikan. Berdasarkan wawancara dengan Staf Keuangan II diperoleh informasi:

"Tidak semua dokumen keuangan dapat dibuka secara penuh kepada publik. Oleh karena itu diperlukan mekanisme pengamanan dan klasifikasi informasi agar tidak terjadi penyalahgunaan data." (Thigor A Kumuay, S.AN Staf Keuangan II, 17 Mei 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem harus tetap memperhatikan regulasi terkait keterbukaan informasi publik dan perlindungan data. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Keuangan I, diketahui bahwa perubahan dari sistem manual menuju sistem digital memerlukan proses penyesuaian. Beliau menyatakan:

"Setiap sistem baru membutuhkan proses adaptasi. Pengguna perlu diberikan pelatihan agar mampu mengoperasikan sistem dengan baik dan meminimalkan kesalahan input data." (Radian Kristiani, SE Staf Keuangan I, 17 Mei 2026)

pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan sistem secara berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam implementasi sistem informasi. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Subbagian Keuangan dan Logistik diperoleh keterangan:

"Pengembangan sistem tentu membutuhkan biaya, baik untuk pengadaan perangkat, pengembangan aplikasi, maupun pemeliharaan sistem. Hal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia."

(Iwan Setiawan, S.IP Kasubag Keuangan dan Logistik, 16 Mei 2026)

Dengan demikian, keberlanjutan sistem sangat bergantung pada dukungan pendanaan yang memadai. Faktor penghambat lainnya adalah perlunya pengaturan terkait keamanan informasi yang akan dipublikasikan. Berdasarkan wawancara dengan Staf Keuangan II diperoleh informasi:

"Tidak semua dokumen keuangan dapat dibuka secara penuh kepada publik. Oleh karena itu diperlukan mekanisme pengamanan dan klasifikasi informasi agar tidak terjadi penyalahgunaan data." (Thigor A Kumuay, S.AN Staf Keuangan II, 17 Mei 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem harus tetap memperhatikan regulasi terkait keterbukaan informasi publik dan perlindungan data. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Keuangan I, diketahui bahwa perubahan dari sistem manual menuju sistem digital memerlukan proses penyesuaian. Beliau menyatakan:

"Setiap sistem baru membutuhkan proses adaptasi. Pengguna perlu diberikan pelatihan agar mampu mengoperasikan sistem dengan baik dan meminimalkan kesalahan input data." (Radian Kristiani, SE Staf Keuangan I, 17 Mei 2026)

efektivitas implementasi pada tahap awal penerapan. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan Operator Sistem Informasi, diperoleh informasi bahwa stabilitas jaringan internet masih menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

"Karena sistem berbasis web bergantung pada koneksi internet, maka kualitas jaringan sangat menentukan kelancaran akses dan pembaruan data dalam sistem." (Wawancara Operator Sistem Informasi, 18 Mei 2026)

Kondisi jaringan yang tidak stabil dapat menghambat proses pengelolaan maupun akses informasi oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, faktor pendukung utama penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong meliputi dukungan pimpinan, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, tersedianya data keuangan yang terstruktur, dan meningkatnya tuntutan keterbukaan informasi publik.

Sementara itu, faktor penghambat yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, keterbatasan anggaran pengembangan sistem, keamanan data, adaptasi pengguna terhadap sistem baru, serta kualitas jaringan internet. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Sorong, Kepala Subbagian Keuangan dan Logistik, Staf Keuangan I, Staf Keuangan II, serta Operator Sistem Informasi, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web didukung oleh komitmen pimpinan, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, tersedianya data keuangan yang terstruktur, dan tuntutan keterbukaan informasi publik. Namun demikian, implementasi sistem masih menghadapi beberapa kendala berupa keterbatasan SDM teknologi

informasi, keterbatasan anggaran, keamanan data, adaptasi pengguna, dan stabilitas jaringan internet yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan sistem ke depan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Bentuk Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di KPU Kabupaten Sorong, diketahui bahwa bentuk Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web yang dibutuhkan merupakan suatu sistem digital yang dirancang untuk menyajikan informasi pengelolaan keuangan pemilu secara terbuka, mudah diakses, dan terintegrasi dalam satu platform berbasis website. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan data keuangan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi informasi publik antara KPU dan masyarakat. Hasil wawancara dengan Ketua KPU, Kasubag Keuangan, staf keuangan, dan operator sistem informasi menunjukkan adanya kebutuhan yang sama terhadap suatu sistem yang mampu menyajikan informasi mengenai perencanaan anggaran, realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban, serta dokumen pendukung lainnya secara transparan.

Temuan menunjukkan bahwa sistem yang diusulkan memiliki orientasi pada peningkatan kualitas layanan informasi publik yang selama ini masih dilakukan melalui mekanisme permohonan informasi. Dengan adanya sistem berbasis web, masyarakat dapat memperoleh informasi secara mandiri tanpa harus mengajukan permohonan secara administratif. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik yang menekankan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi yang mudah diakses, cepat diperoleh, dan sederhana dalam proses pelayanannya sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Bentuk sistem yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan karakteristik utama berupa integrasi data keuangan ke dalam sebuah portal informasi yang dapat diakses oleh berbagai pihak sesuai dengan hak akses yang dimiliki. Administrator sistem berasal dari bagian keuangan dan operator yang memiliki kewenangan untuk menginput, memperbarui, serta memverifikasi data sebelum dipublikasikan kepada masyarakat. Sementara itu, masyarakat bertindak sebagai pengguna informasi yang dapat melihat data anggaran, realisasi keuangan, laporan kegiatan, dan berbagai dokumen publik lainnya. Struktur tersebut menunjukkan bahwa sistem yang dirancang mengadopsi konsep manajemen informasi modern yang menempatkan teknologi sebagai media penghubung antara penyedia informasi dan pengguna informasi.

Menurut Indrajit (2016), sistem informasi berbasis web dalam lingkungan pemerintahan merupakan salah satu bentuk implementasi e-government yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dalam konteks penelitian ini, penerapan konsep tersebut terlihat dari upaya KPU Kabupaten Sorong untuk mengembangkan mekanisme penyampaian informasi yang lebih efektif dibandingkan sistem konvensional. Selain mempercepat distribusi informasi, sistem berbasis web juga mampu mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik sehingga proses pengelolaan informasi menjadi lebih efisien, terdokumentasi dengan baik, dan mudah ditelusuri apabila dibutuhkan pada masa yang akan datang.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bentuk sistem yang dirancang memiliki beberapa fitur utama yang mendukung kebutuhan pengguna, yaitu dashboard transparansi anggaran, informasi realisasi keuangan, laporan pertanggungjawaban digital, grafik penggunaan anggaran, dokumen pendukung, serta layanan informasi publik. Keberadaan fitur-fitur tersebut menunjukkan bahwa sistem tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan data, tetapi juga sebagai instrumen visualisasi informasi yang dapat membantu masyarakat memahami kondisi keuangan pemilu secara lebih mudah. Dashboard yang menampilkan grafik dan persentase penyerapan anggaran memungkinkan informasi yang kompleks disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana dan informatif. Temuan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dari sistem pelaporan yang bersifat administratif menjadi sistem informasi yang berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Menurut Laudon dan Laudon (2020), sistem informasi yang efektif harus mampu mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dan meningkatkan pemahaman pengguna terhadap informasi yang disajikan. Dengan demikian, bentuk sistem yang dihasilkan dalam penelitian ini telah memenuhi karakteristik dasar sebuah sistem informasi modern karena mampu mengintegrasikan data, mengolah informasi, dan menyajikannya dalam format yang mudah dipahami oleh masyarakat sebagai pengguna utama informasi publik.

Ditinjau dari perspektif transparansi publik, bentuk Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan salah satu upaya mewujudkan prinsip keterbukaan dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi menuntut adanya akses informasi yang luas bagi masyarakat terhadap setiap aktivitas yang menggunakan sumber daya publik, termasuk pengelolaan anggaran pemilu. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan menyatakan bahwa masyarakat saat ini memiliki kebutuhan yang semakin tinggi terhadap informasi yang cepat, akurat, dan dapat diakses kapan saja. Oleh karena itu, sistem berbasis web menjadi pilihan yang paling relevan karena mampu menjawab kebutuhan tersebut melalui penyediaan informasi secara real-time.

Menurut Mardiasmo (2018), transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik sehingga memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap kinerja organisasi. Dalam penelitian ini, sistem yang dirancang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana anggaran pemilu direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan oleh KPU Kabupaten Sorong. Dengan demikian, sistem tersebut tidak hanya menjadi sarana penyebaran informasi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan publik yang dapat memperkuat hubungan antara penyelenggara pemilu dan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong merupakan sistem yang mengintegrasikan aspek teknologi informasi, keterbukaan informasi publik, dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam satu platform digital. Sistem ini dirancang untuk menyediakan informasi anggaran dan realisasi keuangan secara terbuka melalui dashboard yang informatif, laporan digital yang mudah diakses, serta fitur dokumentasi yang

mendukung proses akuntabilitas publik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan sistem informasi tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi internal, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Konsep ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menempatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi publik sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, bentuk sistem yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai model penerapan e-government yang berorientasi pada pelayanan publik dan penguatan tata kelola organisasi. Keberadaan sistem tersebut diharapkan mampu menjadi solusi atas keterbatasan akses informasi yang selama ini terjadi sekaligus menjadi inovasi dalam pengelolaan informasi keuangan pemilu di lingkungan KPU Kabupaten Sorong.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web memiliki peran yang signifikan dalam mendukung transparansi pengelolaan keuangan pemilu di KPU Kabupaten Sorong. Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip yang mengharuskan setiap badan publik memberikan akses informasi yang memadai kepada masyarakat mengenai penggunaan sumber daya yang berasal dari negara. Hasil wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Sorong menunjukkan bahwa selama ini informasi keuangan memang tersedia dalam bentuk laporan administrasi dan laporan pertanggungjawaban, namun akses masyarakat terhadap informasi tersebut masih terbatas karena harus melalui mekanisme permohonan informasi. Kehadiran sistem berbasis web memberikan solusi atas permasalahan tersebut dengan menyediakan informasi yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat tanpa melalui prosedur

birokrasi yang panjang. Informasi mengenai perencanaan anggaran, realisasi penggunaan dana, serta laporan pertanggungjawaban dapat ditampilkan secara terbuka dalam satu platform yang mudah diakses. Kondisi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

4.3.2 Sistem Informasi Keuangan mendukung Transparansi dan Akuntabilitas pada KPU Kabupaten Sorong

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem informasi transparansi keuangan berbasis web mampu meningkatkan kualitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Sebelum adanya sistem yang terintegrasi, informasi keuangan umumnya tersimpan dalam dokumen administrasi yang hanya digunakan untuk kebutuhan internal dan audit. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk memperoleh informasi secara cepat ketika ingin mengetahui penggunaan anggaran pemilu. Melalui sistem berbasis web, informasi keuangan dapat disajikan dalam bentuk dashboard interaktif, grafik penggunaan anggaran, laporan digital, dan dokumen pendukung yang dapat diunduh secara langsung. Penyajian informasi yang lebih sederhana dan visual membantu masyarakat memahami data keuangan tanpa harus memiliki kemampuan teknis dalam membaca laporan keuangan yang kompleks.

Temuan menunjukkan bahwa sistem tidak hanya meningkatkan aksesibilitas informasi, tetapi juga meningkatkan kualitas komunikasi publik antara KPU Kabupaten Sorong dan masyarakat. Menurut Heeks (2006), pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor publik dapat meningkatkan

efektivitas penyebaran informasi dan memperkuat hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Dalam konteks penelitian ini, sistem informasi transparansi keuangan berbasis web berfungsi sebagai media komunikasi publik yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara lebih cepat, jelas, dan akurat dibandingkan dengan mekanisme penyampaian informasi secara konvensional yang selama ini diterapkan.

Selain mendukung transparansi, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi berbasis web juga berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemilu. Akuntabilitas merupakan kewajiban suatu organisasi publik untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan penggunaan sumber daya kepada pihak yang memberikan mandat, dalam hal ini masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf keuangan dan Kepala Subbagian Keuangan, diketahui bahwa sistem informasi memungkinkan seluruh data keuangan tersimpan dalam satu basis data yang terintegrasi sehingga memudahkan proses pelaporan dan pertanggungjawaban. Setiap transaksi, kegiatan, dan penggunaan anggaran dapat terdokumentasi secara sistematis serta dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan dalam proses audit atau evaluasi.

Keberadaan sistem menciptakan jejak digital (digital audit trail) yang dapat meningkatkan akurasi data dan meminimalkan potensi kesalahan pencatatan. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas publik dapat diwujudkan apabila setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, terukur, dan terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, sistem informasi transparansi keuangan berbasis web tidak hanya berfungsi sebagai media publikasi informasi, tetapi juga sebagai alat pengendalian dan pengawasan

internal yang mendukung pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemilu di KPU Kabupaten Sorong.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi transparansi keuangan berbasis web berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemilu. Sebelum adanya sistem yang terintegrasi, masyarakat cenderung memiliki keterbatasan informasi sehingga proses pengawasan publik tidak dapat dilakukan secara optimal. Melalui sistem berbasis web, masyarakat dapat memantau perkembangan penggunaan anggaran, membandingkan antara rencana dan realisasi anggaran, serta mengakses dokumen pendukung yang dipublikasikan oleh KPU Kabupaten Sorong. Kemudahan akses tersebut mendorong terjadinya kontrol sosial yang lebih efektif terhadap pengelolaan keuangan publik. Menurut Sedarmayanti (2018), transparansi yang didukung oleh partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penerapan prinsip good governance. Dalam penelitian ini, sistem informasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan lembaga penyelenggara pemilu dengan masyarakat melalui penyediaan informasi yang terbuka dan mudah dipahami. Dengan meningkatnya akses informasi, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam pengawasan serta memberikan masukan terhadap pengelolaan keuangan pemilu sehingga tercipta hubungan yang lebih baik antara penyelenggara pemilu dan publik sebagai pemangku kepentingan utama.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemilu di KPU Kabupaten

Sorong melalui penyediaan informasi yang terbuka, peningkatan aksesibilitas informasi, integrasi data keuangan, kemudahan pelaporan, serta penguatan fungsi pengawasan publik. Sistem ini memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara cepat dan akurat, sekaligus memberikan kemudahan bagi KPU dalam melakukan dokumentasi serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Temuan penelitian ini sejalan dengan konsep e-government yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas organisasi pemerintah. Dengan demikian, penerapan sistem informasi transparansi keuangan berbasis web dapat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemilu yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan terpercaya. Keberadaan sistem tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi internal organisasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KPU Kabupaten Sorong sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam mengelola anggaran publik.

4.3.3 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, diketahui bahwa penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung merupakan kondisi yang dapat memperlancar proses implementasi sistem, sedangkan faktor penghambat merupakan kondisi yang berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan sistem tersebut. Hasil wawancara dengan

Ketua KPU Kabupaten Sorong menunjukkan bahwa dukungan pimpinan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan penerapan sistem informasi. Pimpinan KPU memandang bahwa sistem informasi transparansi keuangan berbasis web merupakan inovasi yang dapat meningkatkan keterbukaan informasi publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk komitmen untuk mengembangkan layanan informasi berbasis teknologi serta mendorong peningkatan kualitas tata kelola organisasi. Menurut Edwards III (1980), keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh komitmen dan dukungan dari pihak yang memiliki kewenangan dalam organisasi. Dalam konteks penelitian ini, dukungan pimpinan menjadi modal penting karena dapat mempengaruhi alokasi sumber daya, penyusunan kebijakan internal, serta koordinasi antarbagian dalam proses penerapan sistem informasi transparansi keuangan pemilu di KPU Kabupaten Sorong.

Selain dukungan pimpinan, faktor pendukung lainnya adalah tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Operator Sistem Informasi, KPU Kabupaten Sorong telah memiliki perangkat komputer, jaringan internet, server, serta website resmi yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan sistem transparansi keuangan berbasis web. Ketersediaan infrastruktur tersebut menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki kesiapan teknis untuk mengimplementasikan sistem informasi yang lebih terintegrasi. Di samping itu, hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Keuangan dan Logistik menunjukkan bahwa data keuangan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Sorong telah terdokumentasi dengan baik melalui berbagai

laporan administrasi dan laporan pertanggungjawaban. Kondisi tersebut memudahkan proses integrasi data ke dalam sistem yang akan dikembangkan. Menurut Indrajit (2016), keberhasilan implementasi e-government sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan ketersediaan data yang dapat dikelola secara digital. Dengan adanya dukungan infrastruktur dan data yang memadai, proses pengembangan sistem informasi transparansi keuangan menjadi lebih mudah dilakukan karena organisasi tidak harus membangun seluruh komponen sistem dari awal. Faktor ini menjadi salah satu kekuatan utama yang dimiliki KPU Kabupaten Sorong dalam mewujudkan sistem informasi yang efektif dan berkelanjutan.

Di samping faktor pendukung, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat yang berpotensi mempengaruhi penerapan sistem informasi transparansi keuangan pemilu berbasis web. Salah satu faktor yang paling dominan adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Operator Sistem Informasi, jumlah personel yang memiliki kemampuan dalam pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem informasi masih relatif terbatas. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi keberlanjutan sistem karena pengelolaan aplikasi berbasis web memerlukan kemampuan teknis yang memadai. Selain itu, hasil wawancara dengan Staf Keuangan menunjukkan bahwa masih diperlukan pelatihan bagi pegawai agar mampu beradaptasi dengan penggunaan sistem yang baru. Menurut Heeks (2006), salah satu penyebab utama kegagalan implementasi sistem informasi di sektor publik adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi yang digunakan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi pegawai melalui

pelatihan dan pendampingan menjadi langkah penting yang perlu dilakukan agar penerapan sistem dapat berjalan secara optimal. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai, sistem yang telah dikembangkan berisiko tidak dimanfaatkan secara maksimal atau bahkan mengalami kendala dalam operasional sehari-hari.

Faktor penghambat lainnya yang ditemukan dalam penelitian ini adalah keterbatasan anggaran serta aspek keamanan data. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Keuangan dan Logistik, pengembangan sistem informasi memerlukan dukungan biaya yang tidak sedikit, mulai dari proses perancangan sistem, pengadaan perangkat pendukung, pemeliharaan server, hingga pembaruan aplikasi secara berkala. Di sisi lain, hasil wawancara dengan Staf Keuangan II menunjukkan bahwa tidak seluruh informasi keuangan dapat dipublikasikan secara terbuka karena terdapat dokumen tertentu yang harus dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sistem yang dikembangkan harus memiliki mekanisme keamanan yang mampu mengatur hak akses pengguna dan melindungi data dari potensi penyalahgunaan. Menurut Laudon dan Laudon (2020), keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem informasi modern karena berkaitan dengan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Dalam konteks penelitian ini, tantangan keamanan data menjadi isu yang perlu diperhatikan agar penerapan sistem transparansi keuangan tetap sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik tanpa mengabaikan perlindungan terhadap informasi yang bersifat terbatas atau rahasia.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU

Kabupaten Sorong memiliki peluang yang besar untuk berhasil karena didukung oleh komitmen pimpinan, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, data keuangan yang terstruktur, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik. Namun demikian, implementasi sistem juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu diantisipasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, kebutuhan pengamanan data, serta proses adaptasi pengguna terhadap sistem yang baru. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan organisasi dalam menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Sejalan dengan teori implementasi kebijakan Edwards III (1980), faktor sumber daya, komunikasi, komitmen pelaksana, dan struktur organisasi merupakan unsur yang saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan suatu program. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Sorong perlu melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan dukungan anggaran, serta penyusunan kebijakan pengelolaan sistem yang jelas agar penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan mampu mendukung terwujudnya transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan pemilu.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong. Bentuk Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong merupakan sistem digital yang dirancang untuk menyajikan informasi keuangan pemilu secara terbuka, terintegrasi, dan mudah diakses oleh masyarakat melalui website. Sistem ini memiliki fitur utama berupa dashboard transparansi anggaran, informasi realisasi keuangan, laporan pertanggungjawaban, grafik penggunaan anggaran, dokumen pendukung, serta layanan informasi publik. Sistem tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai perencanaan dan penggunaan anggaran pemilu secara cepat tanpa harus melalui mekanisme permohonan informasi secara manual. Dengan demikian, sistem informasi berbasis web menjadi sarana yang efektif dalam mendukung penyebaran informasi keuangan pemilu kepada masyarakat.
2. Dukungan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemilu. Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web terbukti mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemilu di KPU Kabupaten Sorong. Dukungan tersebut ditunjukkan melalui kemudahan akses informasi anggaran dan realisasi keuangan, penyajian data secara terbuka dan real-time, serta tersedianya laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, sistem ini mampu

meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan melalui penyimpanan data yang terintegrasi, pencatatan aktivitas keuangan yang terdokumentasi dengan baik, serta kemudahan dalam proses pengawasan dan audit. Keberadaan sistem juga mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemilu sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU Kabupaten Sorong sebagai penyelenggara pemilu.

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web. Penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong didukung oleh beberapa faktor, yaitu adanya komitmen pimpinan dalam mendukung keterbukaan informasi publik, tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang memadai, ketersediaan data keuangan yang terstruktur, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan keuangan publik. Namun demikian, implementasi sistem juga menghadapi beberapa hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi, keterbatasan anggaran pengembangan dan pemeliharaan sistem, kebutuhan pengamanan data dan informasi, proses adaptasi pengguna terhadap sistem baru, serta stabilitas jaringan internet yang mempengaruhi kelancaran operasional sistem. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan dukungan anggaran, serta pengelolaan sistem yang berkelanjutan agar penerapan sistem dapat berjalan secara optimal dan mendukung terwujudnya transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan pemilu di KPU Kabupaten Sorong.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan Sistem Informasi

Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi KPU Kabupaten Sorong

KPU Kabupaten Sorong disarankan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web secara terintegrasi sebagai sarana penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat. Sistem tersebut perlu dilengkapi dengan fitur informasi anggaran, realisasi keuangan, laporan pertanggungjawaban, grafik penyerapan anggaran, serta dokumen pendukung yang dapat diakses secara mudah oleh publik. Selain itu, KPU Kabupaten Sorong perlu memastikan bahwa informasi yang disajikan selalu diperbarui secara berkala agar masyarakat memperoleh data yang akurat, relevan, dan terkini.

2. Bagi Pengelola Sistem dan Sumber Daya Manusia

KPU Kabupaten Sorong perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas mengelola sistem informasi melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kompetensi di bidang teknologi informasi. Peningkatan kemampuan tersebut penting untuk mendukung pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem secara berkelanjutan. Selain itu, perlu ditetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas terkait pengelolaan data, pembaruan informasi, keamanan sistem, serta mekanisme publikasi informasi keuangan agar sistem dapat berjalan secara efektif dan akuntabel.

3. Bagi Masyarakat dan Peneliti Selanjutnya

Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pemilu. Partisipasi

masyarakat dalam memanfaatkan informasi yang tersedia dapat mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu yang lebih baik. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai efektivitas penggunaan sistem informasi transparansi keuangan setelah diterapkan, termasuk mengkaji tingkat kepuasan pengguna, kualitas layanan informasi publik, serta pengaruh sistem terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu.

4. Bagi KPU Republik Indonesia

KPU Republik Indonesia disarankan untuk mendorong pengembangan sistem transparansi keuangan yang terstandarisasi dan terintegrasi pada seluruh KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Standarisasi sistem akan mempermudah pengelolaan informasi keuangan, meningkatkan kualitas pelaporan, serta mendukung penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara merata di seluruh Indonesia. Selain itu, dukungan kebijakan, pendanaan, dan pendampingan teknis dari KPU RI sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan implementasi sistem di daerah.

5. Bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan

Pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait diharapkan dapat mendukung penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu melalui penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, peningkatan kualitas jaringan internet, serta dukungan kolaborasi dalam pengembangan layanan informasi publik berbasis digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, N. A., Sore, U. B., & Mustapa, Z. (2025). Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Upacara Rambu Solo' Di Kabupaten Tana Toraja. *Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion*, 4(2), 112–120. <https://doi.org/10.56326/jp.v4i2.5246>
- Alfiah, A., al, et, Ady Bakri, A., Syahdan, R., & Rusman, H. (2023). Capability to Manage Financial Reports for MSMEs Utilizing Accounting Information Systems. CAPABILITY TO MANAGE FINANCIAL REPORTS FOR MSMES UTILIZING ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). *Jurnal Ekonomi*, 12(02), 2023. <http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi>
- Andriyan, Y., Munzir, M., Sismar, A., Athirah, A. M., Hidayat, R., Henraman, H., & Sakti, D. A. B. (2024). Peningkatan Pengetahuan tentang E-Government dalam Pengembangan DesaBerbasis IT pada Kampung Fafanlap Kabupaten Raja Ampat. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 3(4), 447–455. <https://doi.org/10.59025/3xw7vk39>
- Arioen, R., Ahmaludin, H., Junaidi, J., Indriyani, I., & Wisnaningsih, W. (2023). *BUKU AJAR METODOLOGI PENELITIAN* (1st ed.). CV.EUREKA MEDIA AKSARA.
- Dahlia, D., Sumardjono, S., & Lubis, D. J. (2025). DEVELOPMENT OF THE ASTA CITA PROGRAM THROUGH MSME INDUSTRY DOWNSTREAMING TO SUPPORT ECONOMIC GROWTH AND LABOR-INTENSIVE EMPLOYMENT. *ABDI DOSEN*, 9(3), 1472–1480.
- Ekawaty, O. D., & Kayko, R. O. (2023). MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DESTINASI PARIWISATA TERINTEGRASI DI KABUPATEN KUDUS. *Cetak) Journal of Innovation Research and Knowledge*, 3(2), 339–352.
- Hardianti Marsawal, S., Kara, M., Bulutoding, L., Akuntansi, J., & Islam Negeri Alauddin Makassar, U. (2021). KAJIAN PSAK 112 TENTANG AKUNTANSI WAKAF. In *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* (Vol. 2).
- Herlin, H., Nurmalasari, A., & Andry W Mamonto, M. W. (2020). EKSPLORASI NILAI-NILAI SIPAKATAU SIPAKAINGE SIPAKALEBBI BUGIS MAKASSAR DALAM UPAYA PENCEGAHAN SIKAP INTOLERANSI. *Alauddin Law Development Journal*, 5(2), 284–293. <https://www.suara.com/news/2017/03/28/171418/akibat-isu-sara-di-pilkada-dki-anak-sd-jadi-bahaya-seperti->
- Iqbal, M., & Fridayani, H. D. (2022). E-GOVERNMENT ACCEPTANCE MODEL DURING COVID-19 CRISIS IN TAINAN CITY, TAIWAN. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 14(1), 1–11. <https://doi.org/10.33701/jtp.v14i1.1861>
- Kartini, N. (2023). PENGARUH SISTEM PELAPORAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LENGKONG, KECAMATAN BOJONGSOANG PADA MASA PANDEMI COVID-19. *JURNAL EKONOMIKA45*, 10(2), 197–209.

- Marcella, D., Novendy, L., Vincent, V., & Cuandra, F. (2022). Implementasi Manajemen Operasional Terhadap Penyelesaian Masalah di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. *JURNAL ILMIAH EKONOMI GLOBAL MASA KINI*, 13(2), 115–124.
- Mazzoli, C., & Baiocco, S. (2025). Unlocking sustainable investing through digital financial literacy: the impact of advanced digital skills. *International Journal of Bank Marketing*. <https://doi.org/10.1108/IJBM-10-2024-0622>
- Melyn Anggraini, & Ersi Sisdianto. (2024). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN SYARIAH DAN PERANANNYA DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 2(12), 491–505. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i12.3272>
- Mihadi Putra, Y., Fardinal, F., & Janee Ali, A. (2024). Enhancing Financial Reporting for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs): System Design and Analysis. *Countable (Contemporary Business and Sustainability Science)*, 1(1), 62–74. <https://doi.org/10.22441/countable.2024.v1i1.001>
- Muaro, U., Diponorogo, B. J., & Rimbo Tengah, K. (2023). The Implementation of Financial System Information toward The Function of Regional Financial Supervision on Regional Financial Management in Bungo Regency Herawati. *Journal on Education*, 05(02), 4259–4269.
- Praditya, R. A. (2022). Kinerja Organisasi Pada Manajemen Rantai Pasokan Pariwisata : Bagaimana Peran Manajemen Sumber Daya Manusia, Kepuasan Pelanggan? *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL)*, 3(2), 17–21.
- Pramudyawardhani, M., & Munari, M. (2023). THE INFLUENCE OF TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY, SUPERVISION, AND HR COMPETENCE ON APBD MANAGEMENT AT BPKAD SURABAYA CITY. *International Journal of Economy, Education, and Entrepreneurship*, 3(2), 409–422. <https://doi.org/10.53067/ije3.v3i2>
- Prihatminingtyas, B., Fatima, W. Q., & Khairunisa, L. (2021). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Panti Asuhan Al-Maun Desa. *Ngajum Kabupaten Malang. Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 9(1), 37–44.
- Pristianto, H., Rusdi, A., Butudoka, M. A., & Pamudjianto, A. (2024). Pembangunan Ibu Kota Propinsi Papua Barat Daya Berbasis Good Watersheds Management. *Konstruksia*, 15(2), 130. <https://doi.org/10.24853/jk.15.2.130-146>
- Rachman, A., Yochanan, Y., Samanlangi, A. I., & Purnomo, H. (2024). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN RD*. Saba Jaya.
- Rahma Sari Pane, S. H., & Kamilah, K. (2023). Analisis Sistem Akuntansi Wakaf Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Harta Wakaf Kua Kecamatan Percut Seituan. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(3), 529–545.
- Rahmawati Trisnanda, N., Masitoh, E., & Siddi, P. (2022). PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN, KOMITMEN ORGANISASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL.

- ECOBISMA (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, 9(1), 157–167.
- Rajab, A. M., Andriyan, Y., Muhamad, S., & Supardi, E. (2023). Legalitas Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada. *JPPAP: Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adimistrasi Publik*, 3(1), 36–51.
- Rijal Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Saputra, M. R., & Ramadhani, S. (2021). SISTEM INFORMASI BANTUAN DANA HIBAH OPERASIONAL RUMAH IBADAH KABUPATEN BENGKALIS. *Jurnal Teknologi Dan Informasi Bisnis*, 3(1), 147–152. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.171>
- Sokid, S., & Isa Martinus, A. (2023). SISTEM INFORMASI ASMARA (ASPIRASI MASYARAKAT) DESA SEBAGAI DASAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERBASIS WEB ANDROID DIMASA PANDEMI COVID 19 : STUDI KASUS DESA BOJONGKULON. *Jurnal Teknologi*, 15(1), 51–56. <https://doi.org/10.24853/jurtek.15.1.51-56>
- Stephanie Hidayat, V., Angela, A., Tjun Tjun, L., Indrawati Marpaung, E., Lestari Dewi, N., & Maranatha, K. (2024). Training on the Creation and Digitalization of Financial Reports for the Success of MSMEs in the Future. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 15(4), 817–823. <http://journal.upgris.ac.id/index.php/e-dimas>
- Sugiyono, A. (2001). *Metodologi Ekonomi Positivisme*.
- Supardi, E., Difnubun, M. I., & Muhamad, S. (2023). ANALISIS KEBIJAKAN: PENGEMBANGAN USAHA SEKTOR PERIKANAN PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG. *Politik Anggaran Dan Adimistrasi Publik*, 2(1), 10–22.
- Supawanhar, S., Askani, A., Charolina, O., Ditasman, D., & Hartono, R. (2022). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN MASJID MELALUI PELATIHAN ADMINISTRASI KEUANGAN MASJIDAL-MUTTAQIN KOTABENGKULU. *Jurnal Pengabdian Masyarakat BUMI RAFFLESIA*, 5(1), 817–823.
- Surya Atmaja, D., Fachrurazi, F., Abdullah, A., Fauziah, F., Nur Zaroni, A., & Yusuf, M. (2023). ACTUALIZATION OF PERFORMANCE MANAGEMENT MODELS FOR THE DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES QUALITY, ECONOMIC POTENTIAL, AND FINANCIAL GOVERNANCE POLICY IN INDONESIA MINISTRY OF EDUCATION. *Multicultural Education*, 9(1), 1–15.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Judul Penelitian

Transparansi Anggaran pada Penerapan Sistem Informasi Berbasis Web di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong

Tujuan Wawancara

Wawancara ini bertujuan memperoleh informasi mengenai pelaksanaan transparansi anggaran melalui penerapan sistem informasi berbasis web di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong.

A. Identitas Informan

Uraian	Keterangan
Nama	
Jabatan	
Instansi	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong
Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	

B. Pertanyaan Wawancara

1. Aspek Transparansi Informasi

1. Bagaimana kebijakan Kantor KPU Kabupaten Sorong dalam menerapkan transparansi anggaran kepada masyarakat?
2. Mengapa website dipilih sebagai media penyampaian informasi anggaran kepada publik?
3. Informasi anggaran apa saja yang dipublikasikan melalui website?
4. Apakah seluruh dokumen anggaran dapat diakses oleh masyarakat?
5. Bagaimana proses publikasi informasi anggaran sebelum ditampilkan pada website?
6. Seberapa sering informasi anggaran diperbarui?
7. Bagaimana masyarakat dapat mengetahui adanya pembaruan informasi anggaran?

2. Aspek Akuntabilitas

8. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi anggaran pada website?
9. Bagaimana mekanisme verifikasi sebelum data dipublikasikan?
10. Apakah terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan informasi anggaran?
11. Bagaimana upaya menjaga keakuratan informasi yang dipublikasikan?
12. Apakah pernah terjadi kesalahan informasi pada website? Bagaimana cara mengatasinya?

3. Aspek Aksesibilitas

13. Bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi anggaran melalui website?
14. Apakah website dapat diakses setiap saat?
15. Apakah informasi yang tersedia mudah dipahami oleh masyarakat umum?
16. Bagaimana jika masyarakat membutuhkan informasi yang belum tersedia pada website?
17. Apakah terdapat menu khusus mengenai informasi publik atau PPID pada website?

4. Aspek Partisipasi Masyarakat

18. Apakah masyarakat dapat memberikan masukan atau kritik terhadap informasi yang dipublikasikan?
19. Bagaimana mekanisme penyampaian pengaduan masyarakat?
20. Apakah pernah ada permintaan informasi anggaran dari masyarakat?
21. Bagaimana tindak lanjut terhadap permintaan informasi tersebut?

5. Aspek Kendala

22. Apa saja kendala dalam pengelolaan website sebagai media transparansi anggaran?
23. Apakah terdapat keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola website?
24. Bagaimana kendala teknis yang sering terjadi?
25. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

6. Aspek Efektivitas Sistem Informasi Berbasis Web

26. Menurut Bapak/Ibu, apakah website sudah efektif sebagai media transparansi anggaran?
27. Apa indikator keberhasilan penerapan sistem informasi berbasis web di KPU Kabupaten Sorong?
28. Apakah penggunaan website meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KPU?
29. Apa manfaat terbesar yang dirasakan setelah penerapan sistem informasi berbasis web?
30. Apa saran Bapak/Ibu agar transparansi anggaran melalui website dapat lebih optimal?

C. Pertanyaan Khusus Berdasarkan Informan

1. Ketua KPU Kabupaten Sorong

1. Bagaimana komitmen pimpinan dalam mewujudkan transparansi anggaran?
2. Bagaimana evaluasi terhadap implementasi sistem informasi berbasis web?
3. Bagaimana pengawasan terhadap publikasi informasi anggaran?
4. Apa kebijakan strategis untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik?

2. Sekretaris/Kasubbag Keuangan

1. Bagaimana proses penyusunan laporan anggaran sebelum dipublikasikan?
2. Bagaimana mekanisme verifikasi laporan keuangan?
3. Apakah seluruh realisasi anggaran dipublikasikan?
4. Bagaimana memastikan kesesuaian data antara laporan keuangan dan informasi pada website?

3. Admin Website / Pengelola Sistem Informasi

1. Bagaimana alur pengunggahan dokumen ke website?
2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbarui informasi?
3. Apa kendala teknis yang sering dihadapi?
4. Bagaimana menjaga keamanan data pada website?

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

1. Bagaimana mekanisme pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Sorong?
2. Apakah terdapat permohonan informasi terkait anggaran?
3. Bagaimana prosedur pemberian informasi kepada masyarakat?
4. Apa bentuk evaluasi terhadap pelayanan informasi publik?

5. Masyarakat/Pengguna Website

1. Apakah Anda mengetahui bahwa informasi anggaran dapat diakses melalui website KPU Kabupaten Sorong?
2. Bagaimana pendapat Anda mengenai kemudahan penggunaan website?
3. Apakah informasi yang tersedia sudah lengkap?
4. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan mencari informasi?
5. Menurut Anda, apa yang perlu ditingkatkan dari website tersebut?

D. Penutup

"Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk memberikan informasi. Seluruh informasi yang diberikan akan digunakan hanya untuk kepentingan akademik dan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian."

HASIL ANALISIS DATA KUALITATIF

A. Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang diperoleh selama penelitian.

Tabel A.1 Kondensasi Data Hasil Wawancara

Informan	Kutipan Wawancara	Kode	Tema
Ketua KPU Kabupaten Sorong	"Website digunakan sebagai media publikasi laporan anggaran agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah."	KW-01	Keterbukaan Informasi
Kasubbag Keuangan	"Semua realisasi anggaran diinput sesuai laporan keuangan yang telah diverifikasi."	KW-02	Akuntabilitas
Admin Website	"Informasi diperbarui apabila terdapat perubahan dokumen maupun laporan realisasi."	KW-03	Pembaruan Informasi
Operator PPID	"Website juga menjadi sarana masyarakat memperoleh dokumen publik tanpa harus datang langsung."	KW-04	Aksesibilitas
Masyarakat	"Informasi yang tersedia cukup membantu, namun beberapa dokumen belum diperbarui."	KW-05	Kendala Transparansi

Hasil Reduksi Data

Berdasarkan proses reduksi data diperoleh beberapa tema utama sebagai berikut.

Tema	Temuan
Transparansi Informasi	Website menyediakan informasi mengenai anggaran dan laporan keuangan.
Akuntabilitas	Setiap data yang dipublikasikan telah melalui proses verifikasi internal.
Aksesibilitas	Informasi dapat diakses masyarakat kapan saja melalui website.
Kendala	Belum semua informasi diperbarui secara berkala karena keterbatasan SDM dan waktu.

B. Penyajian Data (Data Display)

Tabel B.1 Matriks Penyajian Data Berdasarkan Fokus Penelitian

Fokus Penelitian	Temuan Lapangan	Hasil Observasi	Dokumentasi
Keterbukaan Informasi	Informasi anggaran dipublikasikan melalui website	Menu Informasi Publik tersedia	Screenshot Website
Akuntabilitas	Data telah diverifikasi sebelum dipublikasikan	Dokumen sesuai laporan keuangan	Laporan Realisasi Anggaran
Aksesibilitas	Website dapat diakses masyarakat	Website aktif selama penelitian	Dokumentasi Website
Kendala	Pembaruan informasi belum rutin	Beberapa menu belum diperbarui	Arsip Website

Tabel B.2 Hubungan Antara Indikator Transparansi dan Temuan Penelitian

Indikator Transparansi	Hasil Penelitian
Ketersediaan Informasi	Sudah tersedia melalui website resmi
Kemudahan Akses	Mudah diakses oleh masyarakat
Ketepatan Waktu	Belum seluruh informasi diperbarui secara berkala
Kelengkapan Informasi	Sebagian besar dokumen tersedia
Kemudahan Dipahami	Informasi disajikan dalam bentuk PDF dan berita

C. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)

Tabel C.1 Kesimpulan Berdasarkan Triangulasi Data

Fokus Penelitian	Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Hasil Dokumentasi	Kesimpulan
Transparansi	Website digunakan sebagai media publikasi anggaran	Informasi tersedia pada menu informasi publik	Dokumen anggaran dipublikasikan	Transparansi telah diterapkan melalui sistem informasi berbasis web.
Akuntabilitas	Data diverifikasi sebelum	Dokumen sesuai arsip keuangan	Laporan Realisasi Anggaran	Proses publikasi telah memenuhi prinsip

	dipublikasikan			akuntabilitas.
Aksesibilitas	Website dapat diakses masyarakat	Website aktif	Dokumentasi Website	Sistem memudahkan masyarakat memperoleh informasi publik.
Kendala	SDM terbatas	Update belum rutin	Arsip belum lengkap	Diperlukan peningkatan pengelolaan website.

Verifikasi Data

Verifikasi dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Tabel C.2 Triangulasi Sumber

Informasi	Ketua KPU	Kasubbag Keuangan	Admin Website	Hasil
Publikasi Anggaran	✓	✓	✓	Valid
Verifikasi Dokumen	✓	✓	✓	Valid
Pembaruan Website	✓	✓	✓	Valid

Tabel C.3 Triangulasi Teknik

Data	Wawancara	Observasi	Dokumentasi	Kesimpulan
Transparansi Anggaran	✓	✓	✓	Konsisten
Website	✓	✓	✓	Konsisten
Laporan Keuangan	✓	-	✓	Konsisten

Tabel C.4 Hasil Verifikasi Akhir

Tema	Bukti	Status
Transparansi Anggaran	Wawancara, Website, Dokumen	Terverifikasi
Akuntabilitas	Laporan Keuangan dan Wawancara	Terverifikasi
Aksesibilitas Informasi	Observasi Website	Terverifikasi
Kendala Pengelolaan	Wawancara dan Observasi	Terverifikasi



Wawancara Informan I Ketua KPU Kabupaten Sorong Frenki Dwarah, S.HUT



Wawancara Informan II Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Marthen Kambuaya, SE M Si





Lampiran 16. Lembar Bimbingan

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL
ATAU SKRIPSI

NAMA : VINCE NABDAWANA SALAMANA
NIM : RPL 22A62201002
JUDUL : PENERAPAN SISTEM INFORMASI TRANSPARANSI
KEWAJIBAN PEMILU BERBASIS WEB PADA KPU KABUPATEN
SORONG

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	CATATAN REVISI	Paraf Dosen Pembimbing	
				1	2
1.	07/03/2026	Judul	Mengesahkan lokasi karya	MR.	
2.	21/03/2026	Bab I	- bab belahang - Rumus Mersel	MR.	
3.	05/04/2026	Bab II	- bagian dari Mengesahkan Variabel	MR.	
4.	12/04/2026	Bab II	- Penditka kondusko - kerangka fiber	MR.	
5.	27/05/2026	Bab III	- Metode kualitatif - disesuaikan	MR.	
6.	09/06/2026	dll	Validasi serta dan Persiapan SUP.	MR.	